



DESA BINAAN IMIGRASI DI BREBES

Kepala Kantor Imigrasi Pemalang Arvin Gumilang (depan kedua kiri) didampingi Camat Wanasari Nuriddin (depan kiri), Kepala Desa Sawojajar Suwandi (depan kanan) dan Koordinator Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Brebes Agnes Kadarismi (depan kedua kanan) memaparkan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) saat Peresmian Desa Binaan Imigrasi di Desa Sawojajar, Brebes, Jawa Tengah, Selasa (17/10). Pembentukan Desa binaan oleh Imigrasi Pemalang tersebut untuk mengedukasi dan pembinaan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman dan upaya pencegahan dari pemberangkatan pekerja migran secara nonprosedural.

IDN/ANTARA

DAS di Pulau Jawa Kritis, Perparah Krisis Air Bersih

Di Jawa khususnya, Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis itu sudah sangat banyak. Jadi kalau misalkan daerah serapan air kita itu tidak terestorasi atau tidak terpelihara dengan baik, maka kita cenderung bergantung pada air permukaan, waduk, danau, Sungai. Jadi kepada semua pihak DAS krisis ini harus menjadi konsen bersama untuk direstorasi.

JAKARTA (IM)- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti Daerah Aliran Sungai (DAS) di Pulau Jawa sudah mulai

kritis. Hal inilah yang memperparah krisis air bersih ketika musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino. "Jawa khususnya itu DAS

kritis itu sudah sangat banyak. Jadi kalau misalkan daerah serapan air kita itu tidak terestorasi atau tidak terpelihara dengan baik, maka kita cenderung bergantung pada air permukaan, waduk, danau, sungai," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam Disaster Briefing, dikutip Selasa (17/10).

Sehingga, kata Aam, DAS kritis ini akan memperparah krisis air bersih ketika kemarau panjang. "Kalau hari tanpa hujan air hujan ya sudah tidak turun lebih dari 2 bulan, 3 bulan, otomatis air permukaan itu turun," ujarnya.

"Nah harusnya ini ketika kalau misalnya kita punya lingkungan yang sepanjang DAS

mulai dari hulu sampai hilir itu bagus maka air hujan yang turun sebelumnya itu bisa terpreservasi di tanah, jadi air tanah, ground water flow," jelas Aam.

Aam pun mengingatkan kepada semua pihak bahwa DAS krisis ini harus menjadi konsen bersama untuk direstorasi. "Nah ini juga yang menjadi konten kita bahwa memang benar-benar kalau kita, karena musim kering seperti ini pasti akan berulang, karena ini udah fenomena," katanya.

"Jadi kalau kita tidak ingin kemudian apakah itu 3 tahun ke depan 4 tahun ke depan kita mengalami krisis air bersih karena air permukaan kita cukup sulit ketika musim kering mau tidak mau kita harus mulai mempreservasi, merestorasi

kondisi lingkungan kita atau kondisi ekosistem kita di hulu sampai ke hilir," pungkasnya.

Pada hal, kata Aam, DAS inilah yang sebenarnya akan menjamin sumur-sumur penduduk itu tetap bisa ada airnya ketika musim kemarau. "Nah karena kondisi daerah resapan air kondisi hutan kita mungkin tidak sebaik berapuluh tahun yang lalu," katanya.

"Sehingga kemudian daerah-daerah yang dulu ketika kita berbicara El Nino, kan 2010, 2015, 2019 itu juga ada, yang mungkin pada saat itu kondisi kekeringan yang tidak separah sekarang masih ada air di sumur dan lain-lain, sekarang udah mulai sangat tipis dan kita tahu enggak jauh-jauh Bekasi, Karawang itu sudah sangat sulit untuk mencari air bersih," kata Aam. ● pra

JIKA TERBUKTI TERLIBAT PENIPUAN LOWONGAN KERJA

Satpol PP Tangsel Bakal Pecat Anggotanya

TANGSEL (IM)- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan akan menindak tegas oknum pegawai yang diduga melakukan penipuan lowongan kerja. Namun Sekdis Satpol PP Kota Tangerang Selatan Septa Mulyana mengatakan, masih menunggu kepastian hukum terhadap oknum tersebut.

Kasus dugaan penipuan lowongan kerja itu dilaporkan oleh Nadia Nuke, seorang wanita warga Kota Tangerang. Perempuan itu mengklaim telah menyetorkan uang sebesar Rp 36 juta sebagai uang pelicin agar bisa menjadi pegawai Satpol PP Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Sapta mengatakan kasus itu masih dalam proses hukum di Polres Metro Tangerang Kota. "Iya yang bersangkutan sudah dipanggil Polres," kata Septa di Tangerang Selatan, Selasa (17/10). Satpol PP Tangsel akan mengambil tindakan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran indisipliner tersebut. "Itu su-

dah ada ketentuan di dalam kontrak kerja bilamana punya permasalahan itu pasti dikeluarkan," ujarnya.

Namun sampai saat ini oknum bernisial A yang diduga melakukan penipuan keriat tersebut masih berdinasi di Satpol PP Kota Tangsel. Hal tersebut dikarenakan belum adanya kepastian hukum dari permasalahan ini. "Kenapa sekarang belum saya pecat, karena satu proses hukum, kedua kita juga sebagai Satpol PP dengan informasi yang mengaitkan dengan lembaga, kita juga tidak bisa gegabah begitu saja," ujarnya.

Sapta menambahkan, penerimaan anggota baru Satpol PP dipastikan tidak ada pungutan biaya sama sekali. Lowongan di Satpol PP juga terbuka untuk umum. "Ya itu kalau ada penerimaan pasti diinformasikan ke publik kemudian lewat pendaftaran tahapan baik tertulis maupun lisan secara fisik, wawancara dan sebagainya. Tidak ada pungutan biaya sama sekali," ujarnya. ● pp

Pj Bupati Tangerang Minta Mutu Pelayanan Publik Tidak Bertele-tele

TANGERANG (IM)- Pj Bupati Tangerang, Andi Ony mengatakan Pemkab Tangerang tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik. Hal tersebut dikatakan Andi saat mengunjungi Gerai Pelayanan Publik Kabupaten Tangerang di Ciputra Mall, Citra Raya Kecamatan Panongan. "Kita berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik kepada seluruh masyarakat," katanya, Selasa (17/10).

Menurutnya, sesuai arahan Presiden RI pada Rakernas bulan Juni 2023 yang lalu tentang Reformasi Birokrasi Berdampak harus segera diimplementasikan di setiap lini pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah.

"Reformasi birokrasi berdampak itu birokrasi yang cepat dan tidak bertele-tele, masyarakat bisa dengan mudah mengakses dan mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan," jelasnya.

Dirinya berjanji akan terus membenahi berbagai kekurangan yang masih terjadi, khususnya pelayanan di Gerai Pelayanan Publik (GPP) yang ada di Mall Ciputra, sehingga masyarakat bisa lebih terlayani dengan baik dan maksimal.

"Kita akan terus tingkatkan dan benahi semua pelayanan publik yang ada. Kekurangan yang ada akan kita segera evaluasi dan carikan solusinya sehingga masyarakat nantinya bisa terlayani dengan lebih baik.

Andi pun berpesan kepada seluruh aparat yang bertugas di Gerai Pelayanan Publik Kabupaten Tangerang senantiasa mengedepankan sisi humanis, informatif dan solutif. "Terima kasih atas dedikasinya. Terus kedepankan sisi yang humanis, informatif dan solutif sehingga masyarakat benar-benar terbantu dan puas akan pelayanan yang diberikan," pungkasnya. ● pp

PERINGATI HARI PANGAN SEDUNIA

Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bogor Gelar Pangan Murah

BOGOR (IM)- Dalam rangka peringatan Hari Pangan Sedunia tepatnya 16 Oktober 2023, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah yang dipusatkan di kantor Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Senin (16/10).

Digelarnya kegiatan tersebut, dengan harapan bisa membantu masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Bogor bisa membeli kebutuhan pokoknya dengan murah dan terjangkau.

Kegiatan pangan murah tersebut sebenarnya sudah rutin dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Asep Mulyana Senin (16/10) di kantor kecamatan Senin kemarin.

Giati semacam ini sudah dilakukan sebanyak 35 kali di tingkat kabupaten Bogor termasuk hari ini serempak dilaksanakan di tingkat kabupaten, kota, provinsi, kementerian perdagangan, kementerian pertanian dan kementerian dalam negeri bersamaan dengan peringatan Hari Pangan Sedunia yang dibuka oleh kepala Bapenas.

Lebih lanjut Asep Mulyana memaparkan, usai menggelar gerakan pasar murah di halaman kantor kecamatan

Bojonggede tersebut, pihaknya berkomitmen menggelar pasar murah ini dengan tujuan untuk mengurangi beban Masyarakat, khusus yang ada di Kabupaten Bogor jelasnya.

Menanggapi anjuran Bupati Bogor agar masyarakat Kabupaten Bogor mengurangi konsumsi beras dan mengantinya dengan makanan lain seperti jagung, talas, singkong, pihak DKP sangat mendukung. Pasalnya menurut pandangan pihak Dinas terkait bahwa mengurangi konsumsi beras tersebut selain mengurangi karbohidrat juga mengingat kondisi pacelklik seperti saat ini, akibat berbagai faktor termasuk adanya El Nino.

Termasuk perang Hamas dengan Israel, itu juga sangat berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat kita saat ini jelas Asep Mulyana. Pihaknya mengklaim bahwa berdasarkan hasil survey di Kabupaten Bogor sudah hampir setiap kecamatan mulai mengurangi konsumsi beras dengan cara mencampur beras dengan makanan lainnya ujar Asep

Sekadar informasi, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kabupaten saat ini sebanyak 293 ton yang kegunaannya untuk mengantisipasi bencana alam seperti kebakaran, tanah longsor, banjir dan musibah

lainnya, ucap Asep Mulyana.

Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Distribusi dan Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Sutriana SP MM, menambahkan kegiatan ini dilaksanakan mengingat harga beras medium di pasaran berkisar hingga Rp 13.500/kg.

Dinas Ketahanan Pangan (DKP) melakukan kerjasama dengan pihak Bulog, dengan melakukan penjualan beras di bawah Harga Eceran Tertinggi (HRT) yakni Rp 10.600/kg. Dengan demikian masyarakat bisa terbantu dengan harga yang sangat terjangkau, dan itu berlaku pada bahan pokok lainnya seperti minyak goreng, sayur mayur, cabe, ayam potong dan lain lain.

Lebih lanjut Sutrisna menjelaskan pihak Dinas Ketahanan Pangan juga selalu intens dalam memantau harga sembako di pasaran setiap hari dengan aplikasi Enumerator yang digunakan sebagai alat pelaporan perkembangan harga di pasaran. "Kami juga melakukan pantauan tersebut setiap hari di 12 pasar yang ada di kabupaten bogor, sehingga bisa melakukan penurunan harga dalam giat pasar murah terlebih jika harga pasaran tersebut tidak stabil atau naik lebih dari 10 persen ujarnya. ● jay/gio



Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor saat menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah yang dipusatkan di kantor Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Senin (16/10).

IS7

Ratusan KWT Tangerang Bantu Pemkot Wujudkan Ketahanan Pangan

TANGERANG (IM)- Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang Banten menyebutkan sebanyak 112 kelompok wanita tani (KWT) binaan telah mendorong terwujudnya ketersediaan, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

"KWT selama ini telah memberikan kontribusi penting secara signifikan di Kota Tangerang terkait ketahanan dan kedaulatan pangan," kata Muhdorun di Tangerang, kemarin.

Ia menjelaskan, DKP Kota Tangerang bekerja sama dengan 112 KWT tersebut berhasil mendistribusikan berbagai bibit secara berkala seperti bibit sayuran, bibit buah-buahan, bibit ikan, dan berbagai bibit ternak lainnya.

Tidak hanya itu, DKP Kota Tangerang juga mencatat sampai tahun 2023 ini pendistribusian bibit tersebut telah berjumlah puluhan sampai ratusan ribu.

"Selama ini, KWT juga telah menerima pendistribusian bibit-bibit yang diberi-

kan DKP Kota Tangerang. Tercatat, 44.130 bibit sayuran telah didistribusikan, 3.935 bibit buah telah didistribusikan, dan 150.800 bibit ikan juga telah didistribusikan," ujarnya.

Selain itu, DKP Kota Tangerang menilai keberadaan 112 KWT di Kota Tangerang ini telah memberikan manfaat yang sangat besar pada daerah maupun lingkungan.

"DKP Kota Tangerang ke depannya akan terus mendorong terbentuknya KWT baru untuk mewujudkan ketersediaan, ketahanan, dan kedaulatan pangan di Kota Tangerang berjalan secara maksimal," kata dia.

Sementara itu, sebaran KWT di Kota Tangerang meliputi Karawaci ada 49, Jatiwung ada 18, Neglasari ada delapan, Larangan ada sembilan, Batuceper ada tujuh, Ciledug ada enam, Benda ada tiga, Cibodas ada lima, Pinang ada satu, Tangerang ada tiga, Peruk ada dua dan Cipondoh ada satu. ● pp

BPJS Ketenagakerjaan Dorong Bos Rumah Makan Lindungi Karyawan

PANDEGLANG (IM)- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Pandeglang mendorong para pemilik kafe dan rumah makan di Pandeglang untuk memastikan bahwa karyawannya memiliki perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pandeglang, Lini Septiana mengungkapkan bahwa semua jenis usaha, termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, seperti kafe di Pandeglang, wajib mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami dari BPJS Ketenagakerjaan mengambil seluruh pemilik usaha di Pandeglang agar mendaftarkan karyawannya ke program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan," ungkapnya, Selasa (17/10).

Ia menjelaskan bahwa di Pandeglang, banyak kedai kopi atau cafe yang masih memiliki barista atau karyawan yang belum memiliki perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. "Layaknya di sini di Pandeglang, masih banyak cafe yang belum mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, undang-undang

mengharuskan setiap pemberi kerja mendaftarkan usahanya dan seluruh karyawannya," tambahna.

Lini menegaskan pentingnya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja dan pemberi kerja. Ketika terjadi kecelakaan kerja atau risiko kematian, tanggung jawab sosialnya bukan menjadi beban pemberi kerja, melainkan dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam program negara.

"Pekerja memiliki hak atas Jaminan Hari Tua (JHT), bukan hanya JKK dan JKM. Mereka memiliki tabungan yang dapat diakses ketika pensiun. Ini sangat penting karena jika tidak ada pesangon, mereka dapat mengandalkan program ini," tambahna.

Ia juga menyampaikan perlunya masyarakat, terutama pekerja, untuk memastikan perlindungan mereka sendiri. Ini bukan hanya tentang melindungi diri sendiri, tetapi juga tentang melindungi keluarga dan orang-orang terkasih. "Kami berharap pekerja memahami pentingnya perlindungan ini terhadap risiko pekerjaan. Ini bukan hanya tentang melindungi diri kita, tetapi juga keluarga kita," pungkasnya. ● pra

Dua Inovasi Pemkab Bogor Divalidasi Tim Penilai IGA Award Kemendagri



Pemkab Bogor gulirkan inovasi "Cageur" dan Duta Inovasi Desa yang divalidasi Tim Penilai IGA Award Kemendagri.

BOGOR (IM)- Dua inovasi yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam hal ini Bappedalitbang Kabupaten Bogor dan RSUD Cibinong yakni Duta Inovasi Desa dan Inovasi Layanan Kesehatan Ngaruban Dulur (Cageur) dinilai langsung oleh Tim Validasi Innovative Government Award (IGA) tahun 2023 dari Kemendagri RI yang berlangsung di Kantor Bappedalitbang dan RSUD Cibinong, Senin (16/10).

Di kesempatan yang sama juga dilaksanakan Gelar Inovasi Daerah yang diikuti oleh 9.500 mahasiswa dari 15 perguruan tinggi, untuk mencari cikal bakal generasi penerus yang inovatif untuk mendorong terwujudnya Indonesia Emas dan generasi bonus demografi.

Kepala Pusat Pengembangan SDM, IT dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri Kemendagri RI, Aferi S. Fudal mengungkapkan, suatu

inovasi yang luar biasa mengingat kondisi luas wilayah Kabupaten Bogor dan jumlah masyarakat yang cukup besar.

Duta Inovasi Desa bisa diakselerasikan dengan pemerintah desa bagi kebermanfaatan dan kemajuan masyarakat desa. Demikian juga dengan layanan kesehatan Cageur bisa mengoptimalkan layanan kesehatan berbasis digital kepada masyarakat luas. Hospital, hospital without wall, sebagai upaya mempermudah akses pelayanan langsung kepada masyarakat.

"Tujuan kami adalah memudahkan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan kami mencoba memperluas cakupan selain melakukan transformasi pelayanan kesehatan secara digital dan tentu kami sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Bogor berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan untuk mewujudkan Bogor Sehat tentunya dengan ada inovasi ini," tukasnya. ● gio